



Buletin

Parlementaria

Nomor 1037/III/I/2019 • Januari 2019



Perwujudan Parlemen Modern Perkuat Kinerja DPR



9 772614 339005

DPR Dorong Peningkatan
Teknologi BMKG

Hlm. 3

Terima Kunjungan Pelajar, Fadli Zon
Harap Jadi Inspirasi Anak Muda Berpolitik

Hlm. 4



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pmpinan DPR RI dan Pimpinan BURT RI meninjau PBIC

Perwujudan Parlemen Modern Perkuat Kinerja DPR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan, pihaknya terus mewujudkan DPR RI menjadi Parlemen Modern. Selain sebagai legacy, wujud Parlemen Modern merupakan political will bagi internal DPR RI dalam memperkuat kinerja keparlemenan berstandar internasional.

Peresmian Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen atau *Parliament Broadcast and Information Center* (PBIC) akan menampilkan wajah DPR RI yang sesungguhnya.

“Ruangan ini menjadi *Big CCTV*, rakyat bisa melihat berbagai sidang dari Komisi I sampai Komisi XI, serta berbagai alat kelengkapan dewan lainnya. Wartawan juga tak perlu repot-repot naik turun ke ruang sidang, cukup *nongkrong* di ruangan ini, semua sidang bisa langsung diliput,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, dalam sambutannya saat peresmian Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1).

Legislator Partai Golkar ini menilai, sarana dan prasarana di Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen bisa dikatakan

Selain bisa menyaksikan secara langsung sidang dari layar berukuran lebar, pengunjung juga disajikan *update* berbagai berita seputar keparlemenan melalui layar besar aplikasi DPR NOW!

berstandar internasional. Selain bisa menyaksikan secara langsung sidang dari layar berukuran lebar, pengunjung juga disajikan *update* berbagai berita seputar keparlemenan melalui layar besar aplikasi DPR NOW!.

“Kehadiran DPR NOW! yang kemudian disempurnakan melalui kehadiran Pusat Informasi dan Penyiaran

Parlemen menjadikan demokrasi kita akan terus tumbuh pesat. Selain memudahkan kinerja rakyat dan pers dalam memantau kinerja dewan, di sisi lain juga bisa menumbuhkan kesadaran kepada setiap anggota dewan dalam meningkatkan kinerja kedewannya,” tutur Bamsuet.

Bamsuet menuturkan sebagai pemain kunci dalam pentas politik, keberadaan parlemen tak boleh dilepaskan dari profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Adanya ruang Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen juga semakin menguatkan DPR RI menjalankan Parlemen Terbuka. Bahkan, bukan hal yang mustahil jika DPR RI menjadi pionir bagi parlemen negara-negara lainnya dalam menjalankan *Open Parliament* (Parlemen Terbuka).

“Saya sudah berkunjung ke berbagai parlemen negara lain. DPR RI merupakan yang terdepan dalam menjalankan Parlemen Terbuka. Di sini pers bisa bebas keluar masuk, wawancara apapun kepada anggota dewan tanpa terlebih dahulu membuat janji. Berbagai sidang kita lakukan secara terbuka, data maupun informasi yang bukan bersifat rahasia negara kita buka seluasnya,” terang legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Selain meresmikan Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen, Bamsuet juga meresmikan Ruang Tunggu VIP DPR RI di selasar Gedung Nusantara II DPR RI. Ruangan ini akan menjadi tempat transit bagi para Duta Besar, Delegasi parlemen dari negara sahabat, maupun menteri dan mitra kerja DPR RI lainnya.

“Ruangnya dibuat sederhana seperti *lounge* di bandara. Karena memang fungsinya untuk transit para tamu sebelum mereka masuk ke ruang sidang atau melakukan kegiatan kunjungan di DPR RI. Ruangan ini juga bisa kita jadikan sebagai tempat *focus group discussion* (FGD) dengan teman-teman wartawan ataupun elemen masyarakat lainnya,” pungkas Bamsuet.

Peresmian Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing, sejumlah Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Anggota BURT DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta pejabat di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

DPR Dorong Peningkatan Teknologi BMKG

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku memiliki harapan yang sangat tinggi agar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dapat menjadi lembaga yang lebih kuat ke depannya. Untuk itu, ia mendorong BMKG agar dapat meningkatkan teknologi *early warning system* secara masif.



Foto: Andri/jk

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengunjungi Kantor BMKG

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BMKG di Kemayoran, Jakarta, Rabu (09/1). Dalam kunjungan yang didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi itu, Fahri melakukan pendalaman terkait kinerja yang selama ini dilakukan BMKG. Ia diterima langsung Kepala BMKG Dwikorita Karnawati beserta jajaran.

“Saya berharap bagaimana lembaga ini punya format yang solid, sehingga dapat menyatukan dan memperbaiki bangsa secara menyeluruh. Jangan pernah takut dengan kehancuran yang kita alami, tetapi bagaimana kita bisa kembali bangkit. Berapa banyak pikiran yang dapat kita satukan untuk memperbaiki itu yang paling penting,” tegasnya.

Berangkat dari rasa empati terhadap berbagai tragedi bencana yang terjadi di Indonesia saat ini, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menyadari bahwa hal utama saat ini adalah bentuk sinergi dari seluruh pihak untuk berkomitmen dalam

melakukan pembangunan kembali pasca kehancuran akibat bencana.

“Terus terang, kesadaran sebagai bangsa itu patok yang paling kuat ada pada lembaga-lembaga negara yang khususnya secara konkret mengurus warga secara langsung,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa saat ini pihak BMKG mulai menerapkan dan mengaplikasikan revolusi industri 4.0 yang dicanangkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga mengklaim bahwa 70 persen dari sumber daya di BMKG adalah generasi milenial, sehingga lembaga tersebut kini berisikan para pekerja yang haus akan inovasi.

“Pengembangan industri 4.0 sudah mulai diterapkan untuk mengawasi dan memantau dasar laut hingga angkasa. Kami juga coba mentransformasikan teknologi Jepang untuk diterapkan, sehingga itulah yang memaksa kami untuk bersinergi dengan lembaga lain dan bisa dikatakan 24 jam kami tidak boleh tutup,” imbuh Dwikorita. ■ eps/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL Ketua PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I,
Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Arnanda Prihandini,
S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske,
Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Singih Rimbani Kinanti, Siti Nadiyah, Riyani Hidayat, Anrimi
Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus,
Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha,
Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Rini Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Depriisa Citra Akbari,
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,
Safitri Restu Widayati. SIP.

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Tahir

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berfoto bersama guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor

Foto: Geraldi

Terima Kunjungan Pelajar, Fadli Zon Harap Jadi Inspirasi Anak Muda Berpolitik

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi berbagai kunjungan pelajar ke Gedung DPR RI. Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini berharap, kunjungan pelajar ke DPR RI selain menambah pengetahuan tentang lembaga legislatif, juga bisa menginspirasi generasi muda untuk berkiprah di panggung politik Tanah Air.

“Hal ini menjadi sebuah bagian dari edukasi kepada generasi muda sejak ini, untuk mengetahui apa sih lembaga DPR itu dan apa saja tugas-tugas DPR. Hal ini sekaligus menimbulkan kesadaran generasi muda dalam berkewarganegaraan,” ujar Fadli usai menerima kunjungan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1).

Tidak hanya itu, lanjut legislator Partai Gerinda ini, dengan mengunjungi secara langsung Gedung DPR RI, serta melihat Ruang Rapat Paripurna maupun Ruang Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), juga museum DPR RI, ia meyakini sedikit banyak akan menjadi sebuah pengalaman. Bahkan inspirasi bagi generasi muda untuk juga berkiprah atau berprestasi di dunia politik Tanah Air.

“Saya yakin kebanyakan para siswa

yang datang ke DPR RI merupakan pengalaman pertama mereka. Sedikit banyak pengalaman ini akan terekam dalam benak mereka, bahkan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi para siswa untuk ikut berkiprah di dunia politik Tanah Air. Saya berusaha selalu memberi motivasi kepada para siswa untuk terus berjuang, tidak patah semangat dalam meraih cita-cita,” papar Fadli.

Pada kesempatan itu, Fadli menceritakan pengalaman hidupnya yang sejak SD hingga SMP hidup dan bersekolah di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Walaupun tidak berasal dari kota metropolitan, namun dengan semangat, usaha dan doa yang terus menerus, ia mampu menaklukkan ibu kota Jakarta dengan sederet prestasi ketika remaja dan muda. Bahkan hingga ia mampu menjadi Pimpinan DPR RI.

■ ayu/sf

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyebutkan bahwa Komisi I DPR RI telah mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI.

“Jadi sesegera mungkin dibentuk atau diaktifkan gugus tugas (task force) sebagai tahapan pembentukan payung hukum tersebut selambat-lambatnya hingga akhir Bulan Maret 2019,” tuturnya ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra kerja dan stakeholder bidang kesehatan di

Utut Adianto Apresiasi Kiprah KBPPP

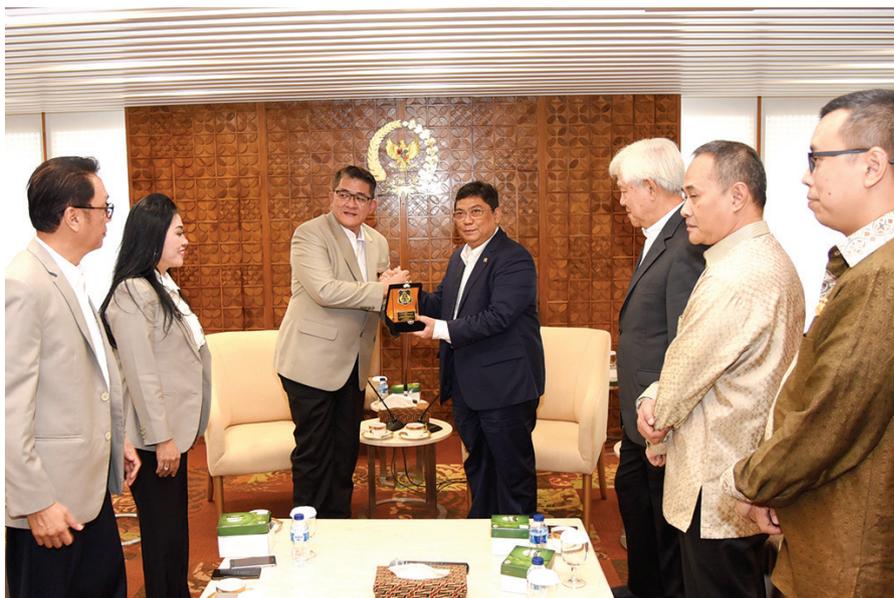
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengapresiasi kiprah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) yang telah berdiri selama 16 tahun di bawah naungan Kapolri.

Menurutnya, hadirnya organisasi KBPPP merupakan satu langkah dalam mempersatukan Indonesia dalam membumikan Pancasila.

“Kegiatan KBPPP sangat bervariasi dan langsung menyentuh rakyat, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan hukum bagi orang yang ekonominya kurang. Namun ada beberapa perbaikan yang perlu mendapat dukungan DPR RI,” ungkap Utut usai menerima jajaran Pengurus KBPPP di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Dalam pertemuan yang membahas mengenai beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh KBPPP dalam menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, legislator PDI-Perjuangan itu berkomitmen akan lebih konkret dalam memberikan dukungan.

“Menurut saya KBPPP merupakan organisasi yang memperkuat karakter bangsa ini dengan sikap menghormati orang tua, profesi serta menjaga silaturahmi. Itu



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan pengurus KBPPP

sebabnya kita harus lebih konkret dalam memberi dukungan,” komitmen legislator dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KBPPP A.H Bimo Suryono mengatakan maksud kedatangannya guna meminta bimbingan dan binaan dari Pimpinan DPR RI. “Kami sebagai organisasi masyarakat dan kepemudaan, kami selalu memohon bimbingan dan binaan dari

Wakil Ketua DPR Pak Utut,” ungkapnya.

Dijelaskan Bimo, organisasi yang terdiri atas putra putri Polri ini ada di setiap wilayah Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 440 ribu orang. Kegiatannya beragam mulai dari bantuan sosial hingga bantuan hukum. “KBPPP berdiri untuk menjadikan manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur,” tutupnya. ■ rnm

Komisi I Desak Kemenkes Prioritaskan Jaminan Kesehatan TNI

Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Kemudian legislator Partai Gerindra itu mendesak BPJS Kesehatan untuk segera mengutamakan pembayaran tunggakan klaim rumah sakit TNI-Kemenhan sesuai peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS non-TNI yang dititipkan ke RS TNI-Kemenhan.

“Di sini kami hanya membantu melakukan mediasi antara BPJS, Kemenkes dengan Kemenhan dan TNI. TNI ini kita ketahui tugasnya berbeda, mereka hanya ingin mendapat kejelasan



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

terkait permasalahan yang mengemuka saat ini,” ujar Asril.

Selain itu, legislator dapil DKI Jakarta itu juga meminta agar Kementerian Pertahanan segera melakukan kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan memasukkan substansi yang mengatur pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI mengadakan rapat lanjutan dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Direktur Utama PT. Asabri, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes yang menyebutkan bahwa sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional di lingkungan Kemenhan dan TNI mengalami kendala.

■ eps/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Foto: Oj/ik

Pemerintah Perlu Beri Perhatian pada Perangkat Desa

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menekankan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada keberadaan perangkat desa. Karena hingga saat ini tidak ada aturan secara khusus yang mengatur status apalagi kesejahteraan para perangkat desa. Menurut Herman, hal ini sedikit aneh mengingat perangkat desa sudah ada dan sudah bekerja sejak republik ini ada.

“Tuntutan pertama yang disampaikan mereka adalah harus ada kepastian hukum terhadap status kepegawaiannya. kenapa harus ada kepastian hukum, karena mereka ini sangat dipengaruhi oleh pimpinannya atau oleh kepala desanya,” kata Herman setelah menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Cirebon di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Kalau kepala desanya berganti, imbuh legislator Partai Demokrat ini, mereka akan kembali menjadi rakyat biasa, meski kemampuannya sangat dibutuhkan. Artinya tidak jaminan oleh

“Tentu kalau ini ingin ditetapkan dalam undang-undang, Komisi II membuka ruang untuk merevisi UU mana yang bisa menetapkan perangkat desa sebagai pegawai yang dijamin kedudukan dan jabatannya. Tentu tidak mudah untuk digeser apabila terjadi pergantian kepala desanya.”

undang-undang bagi perangkat desa untuk tidak kehilangan status dalam pekerjaannya saat kepemimpinan desa berganti.

Kedua, sejalan dengan tuntutan untuk memperkuat status dan posisi jabatannya, muncul permintaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Menurut Herman, di Komisi II DPR RI sudah diputuskan bahwa pendapatan perangkat desa setara dengan PNS golongan IIb. “Nah ini yang tentu juga direspon secara positif oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi realisasinya kan tidak ada sampai sekarang,” terangnya.

Dan yang ketiga tuntutan yang disampaikan adalah untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Herman meyakini tiga tuntutan dari para perangkat desa ini, sebetulnya semuanya bisa dilaksanakan dan tinggal menunggu waktu serta kesesuaian anggaran.

“Tentu kalau ini ingin ditetapkan dalam undang-undang, Komisi II membuka ruang untuk merevisi UU mana yang bisa menetapkan perangkat desa sebagai pegawai yang dijamin kedudukan dan jabatannya. Tentu tidak mudah untuk digeser apabila terjadi pergantian kepala desanya,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. ■ es/sf

Komisi III Kantongi Empat Nama Calon Hakim Agung

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyampaikan bahwa DPR RI dan Komisi Yudisial telah mengantongi empat nama dari delapan kebutuhan calon Hakim Agung. Ia juga mengapresiasi kinerja KY yang pada akhirnya berhasil menyeleksi empat nama. Diakuinya, kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung sangat tinggi, namun membutuhkan kompetensi yang mumpuni.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik bersama Pimpinan DPR RI menerima laporan dari Komisi Yudisial RI terkait empat nama calon Hakim Agung.

“Kami menyadari dan mengapresiasi kerja keras teman-teman KY yang sudah mengirimkan empat nama ini. Kita tahu bahwa kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung ini sangat tinggi dan masih belum bisa kita penuhi untuk kondisi saat ini,” ujarnya usai mengikuti rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan KY di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

Selanjutnya, legislator Partai Demokrat itu menyatakan, Komisi III DPR RI akan melakukan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) kepada empat nama calon Hakim Agung tersebut se usai masa reses mendatang. Ia berharap calon Hakim Agung terseleksi tersebut merupakan pilihan terbaik KY sehingga DPR tidak kesulitan menentukan pilihan.

“Komisi III DPR akan melakukan *fit and proper test* terhadap usulan nama calon Hakim Agung ini setelah masa reses tanggal 13 Februari. Artinya, di tanggal 4 Maret nanti kiranya baru kita bisa proses. Karena dalam masa sidang ini, Komisi III akan fokus terlebih

... hakim pajak ini kita jarang bicarakan. Kita sibuk dengan urusan perdata, urusan pidana, tapi urusan pajak ini agak tidak kita pikirkan atau kurang kita beri ruang, padahal ini sangat penting dalam menopang keuangan negara kita.

dahulu untuk melakukan *fit and proper test* kepada 2 calon hakim konstitusi,” tutur Erma.

Erma menyebut akan memberikan perhatian lebih kepada calon Hakim Agung yang akan mengisi Kamar Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini dianggap penting, karena semua masalah perpajakan dibahas di sana. Terlebih selama ini menurutnya segala penerimaan negara sangat bergantung pada pajak, namun kurang perhatian.

“Nah hakim pajak ini kita jarang bicarakan. Kita sibuk dengan urusan perdata, urusan pidana, tapi urusan pajak ini agak tidak kita pikirkan atau kurang kita beri ruang, padahal ini sangat penting dalam menopang keuangan negara kita. Nah buat kami ini akan menjadi catatan,” imbuh legislator dapil Kalimantan Barat tersebut. ■ **eps/sf**

Pembahasan RUU KSDAE Tunggu Pemerintah

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah sepakat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) untuk ditunda sementara waktu, hingga pemerintah telah menyiapkan RUU sandingan atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Sementara ditunda dulu sampai pemerintah menyiapkan perbandingan revisi UU KSDAE, pemerintah meminta waktu kepada parlemen untuk menyempurnakan DIM adalah suatu hal yang wajar,” ungkap Rahmad usai mengikuti rapat kerja dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Politisi F-PDI Perjuangan ini menuturkan, Komisi IV DPR RI tetap akan menunggu kesiapan pemerintah untuk menyusun penyempurnaan RUU KSDAE bersama-sama. Walaupun dalam tahap penyusunan naskah akademik di DPR RI

“Kalau ternyata pemerintah memandang UU tahun 1990 ini masih bagus, kita hargai. Tapi kita tetap ingatkan bahwa hutan harus dilindungi, reboisasi kembali hutan yang rusak dan beberapa spesies kita punah karena hukuman yang tidak memberikan efek jera, ini adalah fakta dan kita tidak bisa tutup mata,



Foto: Andri/Jk

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo

telah melewati berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait.

“RUU ini sangat fundamental, karena itu kalau pemerintah masih meminta waktu untuk melakukan kajian mendalam

Komisi V Bahas Sarpras Infrastruktur dengan DPRD Nganjuk

Komisi V DPR RI menerima audiensi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, guna mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah setempat.

Tim DPRD Nganjuk dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Jianto dan diterima oleh Anggota Komisi V DPR DI daerah pemilihan Jawa Timur VIII Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan) dan Soehartono (F-NasDem) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1).

Kepada Komisi V DPR RI, Jianto menyampaikan maksud kedatangan timnya untuk meminta dukungan dari Komisi V DPR RI. Ia menuturkan, Nganjuk memiliki banyak potensi pariwisata, namun minim akses (exit tol) serta fasilitas keamanan jalan, seperti pagar pengaman (guard rail) dan penerangan. Menurutnya, hal ini

sangat dibutuhkan, mengingat sebagian letak geografis Nganjuk merupakan daerah pegunungan.

DPRD Nganjuk juga menyampaikan perkembangan pembangunan Bendungan Semantok yang masih terkendala

Kendala yang ada saat ini adalah pembebasan lahan milik Perhutani, sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut.



Foto: Azka/Jk

Anggota Komisi V DPR RI Soehartono

terhadap draf RUU versi DPR, kita hormati. Sebab UU harus persetujuan DPR dan pemerintah, tidak bisa hanya DPR. Pemerintah berembuk dengan parlemen, mana yang terbaik itulah yang kita gunakan dan sepakati,” jelas Rahmad.

Politisi daerah pemilihan Jateng V ini menambahkan, perbedaan pandangan dalam penyusunan RUU adalah hal yang lumrah. Seperti dalam Revisi UU KSDAE ini, DPR RI memandang perlu penguatan hukum untuk melindungi hutan dan ekosistemnya.

Sementara, pemerintah memandang UU Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan digunakan saat ini dan akan diperkuat dengan Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman.

“Kalau ternyata pemerintah memandang UU tahun 1990 ini masih bagus, kita hargai. Tapi kita tetap ingatkan bahwa hutan harus dilindungi, reboisasi kembali hutan yang rusak dan beberapa spesies kita punah karena hukuman yang tidak memberikan efek jera, ini adalah fakta dan kita tidak bisa tutup mata,” imbuh Rahmad. ■ **aan/sf**

pembebasan lahan, dimana yang digunakan adalah lahan hutan milik Perhutani dan sebagian lahan pemukiman warga Desa Kedungpingit, Kecamatan Rejoso, Nganjuk.

Jianto mengatakan, kendala yang ada saat ini adalah pembebasan lahan milik Perhutani, sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nantinya, Bendungan Semantok diharapkan dapat menjadi sarana irigasi lahan pertanian daerah sekitar dan juga sebagai pengendali banjir.

Menanggapi berbagai aspirasi dan masukan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Soehartono mengatakan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nganjuk dan akan meneruskan masukkan-masukkan tersebut kepada Kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.

“Khusus untuk pembebasan lahan milik Perhutani, menurut saya itu tidak masalah. Karena pada hakikatnya Perhutani tidak rugi lahan, hanya harus ada pengganti lahan baru yang disediakan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya. ■ **aan/sf**

Industri Teknologi 4.0 Harus Dihadapi Secara Benar

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, perkembangan industri teknologi 4.0 yang begitu cepat dapat menguntungkan bagi generasi milenial dan pengusaha. Namun jika tidak diikuti secara benar, dapat berbahaya dan merugikan terhadap pelaku usaha karena kondisi industri Indonesia sedang melemah di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat.



Foto: Etno/jk

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan

“Kemajuan teknologi 4.0 yang begitu pesat sangat berdampak baik bagi pelaku usaha dan juga generasi milenial. Tapi masalahnya adalah di Indonesia industrinya sedang melemah produk-produk juga melemah kalau dari sudut *market*,” papar Zulfan saat menerima kunjungan Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut mengatakan, di masa milenial pada saat ini mayoritas warga Indonesia lebih menyukai melakukan pembelian barang lewat *online* walaupun barang-barang di Indonesia masih didominasi dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus turut mengembangkan

produk-produk asal Indonesia agar tidak kalah dari produk luar yang juga akan berdampak baik bagi pelaku usaha dalam negeri.

Lebih lanjut legislator dapil Aceh ini menyampaikan, Komisi VI DPR RI sedang berusaha dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai industri teknologi 4.0, sehingga lebih teratur serta masyarakat nantinya juga harus mengikuti aturan tersebut.

“Teknologi yang begitu pesat ini RUU-nya sedang kita rumuskan. Seandainya ada orang yang tidak mengikuti dan mempelajari UU tersebut akan dikenakan hukuman, karena ini sangat berbahaya jika tidak segera dibuat RUU mengenai ini,” tutupnya. ■ **tn/sf**

Pasca Libur Akhir Tahun, Pasokan BBM dan Gas di Sulut Aman

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung memastikan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan avtur di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terjaga dengan baik pasca liburan akhir tahun. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan BBM dan gas menjelang dan sesudah perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dapat diatasi dengan baik oleh Pertamina.

“Setelah kita mendengarkan presentasi dari General Manager maupun Direksi Pertamina, kelihatannya tidak ada pengaruh yang signifikan karena harga-harga terjaga dengan baik. Pasokan juga dijamin ketersediaannya baik itu BBM, gas, dan avtur dalam kondisi yang meyakinkan, bahwa tidak ada sesuatu yang patut dikhawatirkan usai Tahun Baru dan Natal,” ujar Tamsil.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) PT. Pertamina Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (11/1). Ia

menyampaikan bahwa masyarakat patut memberi apresiasi kepada PT. Pertamina Provinsi Sulut terhadap strategi yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan.

“Saya kira kita patut memberi apresiasi kepada jajaran Pertamina di Sulawesi Utara, karena mereka memang sangat aktif di lapangan. Hal itu terlihat dari cara mereka mempresentasikan, terukur semua apa yang mereka lakukan,” tutur legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di lain sisi, Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan menyoroti konsumsi avtur Sulawesi Utara di akhir tahun 2018. Ia menyebut bahwa walaupun tidak berpengaruh secara signifikan,

namun terjadi stagnansi. Menurutnya hal ini dikarenakan jumlah wisatawan yang mengunjungi Sulut mengalami penurunan.

“Nah jadi biasanya itu per minggu ada 7 penerbangan dari 5 kota yang berbeda dari China, *direct flight* atau penerbangan langsung ke Manado. Tetapi sebulan terakhir ini berkurang menjadi 5. Jadi itu mungkin dari bencana tsunami yang menyebabkan banyak wisatawan yang takut untuk datang ke Sulut,” analisa legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia berharap agar di Tahun Baru ini, kekhawatiran masyarakat akan datangnya bencana hilang, supaya penggunaan konsumsi avtur dapat kembali meningkat. “Tren tersebut sebenarnya bukan menurun ya. Namun kita selalu berharap agar secepatnya kekhawatiran itu menghilang. Kita juga ingin negara ini kembali aman dan stabil supaya dapat kembali meningkatkan penghasilan negara,” tukasnya. ■ eps/sf



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI berfoto bersama jajaran Direksi PT. Pertamina Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara

Foto: Erlangga/rni



Foto: Eрман/ri

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam bersama Tim Kunspek Komisi VII DPR RI saat mengunjungi RSUP Dr. Sardjito, Sleman, Yogyakarta

Komisi VII Dorong RSUP Dr. Sardjito Capai Proper Hijau

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendorong Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, agar meningkatkan capaian pada penataan lingkungan yaitu dengan proper nilai hijau. Saat ini, RSUP Dr. Sardjito mendapat proper dengan nilai biru, yang artinya pengelolaan limbah sudah memenuhi persyaratan.

“Kita dorong nanti di tahun 2019, RSUP Dr. Sardjito bisa menjadi *proper* hijau. Untuk itu, beberapa instalasinya harus ditambah. Nah untuk penambahan ini, tentu saja mengeluarkan biaya terutama untuk limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) infus, infeksi. Kami lihat, mereka belum punya *cool storage* untuk menyimpan limbah B3,” kata Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke RSUP Dr. Sardjito, Sleman, Yogyakarta, Jumat (11/1).

Proper biru yang dicapai RSUP Dr. Sardjito berarti, penilaian terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, hingga pengelolaan limbah B3 telah memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bila berhasil mencapai *proper* hijau, rumah sakit ini adalah satu-satunya di Indonesia yang berhasil meraih nilai tersebut. Setelah itu, ditambahkan Ridwan, barulah Komisi VII DPR RI akan melakukan *roadshow* ke semua

... masyarakat harus bisa menerima RS ini. Jangan sampai nantinya masyarakat sekitar menjadi penghambat bagi RS, dikarenakan dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan langsung dirasakan masyarakat sekitar.

rumah sakit, mulai dari rumah sakit pemerintah agar terpacu untuk meningkatkan *proper* menjadi biru bahkan hijau. Rumah sakit tersebut juga bisa menjadikan RSUP Dr. Sardjito sebagai rujukan dalam pengelolaan limbah.

Selain itu, legislator Partai Golkar ini juga mendorong agar *Corporate Social Responsibility* (CSR) RSUP Dr. Sardjito harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar lingkungan rumah sakit. Menurutnya masyarakat harus bisa menerima rumah sakit ini. Jangan sampai nantinya masyarakat sekitar menjadi penghambat bagi rumah sakit dikarenakan dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan langsung dirasakan masyarakat sekitar.

“Memang betul rumah sakit ini banyak CSR yang diberikan untuk pasien atau masyarakat yang tidak mampu. Ini harus diklarifikasi kembali, masyarakat tidak mampu ini harus untuk di sekitarnya dan diberikan semacam kartu. Kalau dia datang ke rumah sakit, itu bisa dibebaskan untuk yang di sekitarnya. Harus diberikan *private* agar lebih lebih istimewa untuk masyarakat sekitarnya,” tandas legislator dapil Jawa Timur V itu.

Kunspek Komisi VII DPR RI ke RSUP Dr. Sardjito juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam (F-PKB) dan sejumlah Anggota Komisi II diantaranya Agus Sulistyono (F-PKB) Rofi' Munawar (F-PKS), Gandung Pardiman (F-Golkar), Bambang Riyanto (F-Gerindra) dan Andi Yuliani Paris (F-PAN). ■ **es/ft**

Komisi VII Sidak Sejumlah Pabrik di KIM

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat-Sabtu (11-12/1).

“Fungsi pengawasan lapangan harus kita lihat langsung, bagaimana pelaksanaan regulasi pengelolaan limbah yang ada di KIM,” papar Nasir disela-sela Kunspek yang diikuti sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI dan didampingi jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

Nasir menuturkan, sidak ini bertujuan untuk memastikan operasional pengelolaan limbah yang ada di kawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU itu mengamanatkan, semua perusahaan yang akan membuang limbah wajib mengamankan limbahnya



Foto: Amme/mi

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik yang berada di KIM, Sumut

“Kalau ada yang terbukti bermasalah, sesuai aturan hukum kita serahkan kepada Kementerian terkait untuk diproses sesuai perundang-undangan.

hingga proses akhir, sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

Sidak dilakukan di sejumlah perusahaan berskala besar di KIM maupun Deli Serdang, dimulai dari titik air limbah dihasilkan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga *outpole* atau titik keluar

Hampir Semua RS di Badung Sudah Terakreditasi

Hampir semua rumah sakit (RS) yang beroperasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sudah terakreditasi. Setidaknya sudah 90 persen RS pemerintah maupun swasta terakreditasi. Bahkan, 13 Puskesmas pun sudah terakreditasi. Akreditasi ini tentu berdampak pada mutu layanan pasien dalam mengakses layanan kesehatan.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Selasa (15/1). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena yang memimpin pertemuan ini, mengapresiasi capaian akreditasi RS tersebut. Data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Bali, ternyata hanya satu RS yang belum terakreditasi. Selebihnya 5 RS sudah terakreditasi dan 3 RS dalam persiapan akreditasi.

Sebagai bentuk pengawasan, Ermalena menyampaikan, pihaknya sangat berkepentingan melihat sejauh mana akses kesehatan diberikan kepada masyarakat di

Pemkab Badung menerbitkan pula Kartu Badung Sehat (KBS) sebagai pendamping kartu JKN yang diterbitkan BPJS Kesehatan.

limbah. Nasir menambahkan, jika ditemukan perusahaan yang tidak menaati aturan, maka akan diserahkan kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti.

Legislator Partai Demokrat ini juga mengingatkan dinas maupun instansi terkait yang memberikan pemberian izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin pengelolaan limbah agar mengecek kelengkapan dokumen perusahaan, sehingga dapat diketahui apakah nantinya ada perusahaan yang melanggar peraturan.

“Kalau ada yang terbukti bermasalah, sesuai aturan hukum kita serahkan kepada Kementerian terkait untuk diproses sesuai perundang-undangan. Sementara pemberian izin IPAL dan limbah di Kabupaten Deli Serdang dan Medan, instansi terkait akan dipanggil untuk menjelaskan pengawasan yang mereka lakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam pemaparan Direktur Utama PT. KIM Trisilo Ari Setyawan menjelaskan, kawasan KIM mempunyai dua unit pengolahan air limbah, yakni *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) tahap I dengan kapasitas 3.600 m³ per hari dan WWTP tahap II dengan kapasitas 18.000 m³ per hari.

Menurutnya, debit air limbah yang dikelola sampai dengan triwulan III tahun 2018 rata-rata sebesar 120.929 M³ per bulan atau 4.030 M³ per hari. Sementara untuk limbah B3, saat ini PT. KIM belum melakukan pengelolaan limbah B3 dari mitra industri. ■ **ann/sf**

Komisi VIII Serap Aspirasi RUU Pekerja Sosial

Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjangring masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Sosial.

“Komisi VIII DPR RI ingin melihat dan mendengar secara langsung realita para pelaku pekerja sosial, sehingga dalam melakukan pembahasan RUU Pekerja Sosial nanti kita punya bahan yang lebih komprehensif,” kata Ace memimpin pertemuan dengan rektor, dosen dan pengurus STIKS Tamalanrea Makassar, Rabu (16/1).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pekerja sosial seperti pekerja yang selama ini menjadi relawan bencana, pekerja di panti sosial atau di *community development*, adalah salah satu profesi yang belum mendapat payung hukum. RUU Pekerja Sosial penting karena negara harus



Foto: Andri

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

menjamin setiap warga negaranya, supaya terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk para pekerja sosial.

“Perlu ada payung hukum bagi para pekerja sosial, supaya keberadaan mereka seperti halnya profesi-profesi lain yang sudah mempunyai payung hukum diantaranya arsitek, dokter, dosen dan pengacara. Para pekerja sosial juga harus mempunyai hak yang sama seperti profesi yang lain. Mereka juga harus dijamin oleh negara,” tutup Ace.

■ **man/sf**



Foto: Husein/rmi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena (kiri) bersama Bupati Badung

Badung ini. “Terutama terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akhir-akhir ini banyak RS memutuskan samanya dengan BPJS Kesehatan,” kata legislator PPP itu.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung program BPJS Kesehatan. Bahkan Pemkab Badung menerbitkan pula Kartu Badung Sehat (KBS) sebagai pendamping kartu JKN yang diterbitkan BPJS Kesehatan. KBS akan menutup biaya pasien RS yang tidak bisa ditanggung oleh JKN. Komisi IX DPR RI tentu sangat mengapresiasi langkah strategis Pemkab Badung ini. ■ **mh/sf**

Akreditasi RS Dukung Layanan dan Kualitas Mutu Program JKN

Pengawasan pemenuhan akreditasi Rumah Sakit (RS) yang dilakukan Komisi IX DPR RI dalam rangka mendukung layanan dan kualitas mutu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).



Foto: oji/rni
Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam (kanan)

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kedeputusan IX Wilayah Sulawesi dan Maluku, para Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RS Swasta, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel di Kota Makassar, Selasa (15/1).

“Salah satu tujuan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, juga meningkatkan sumber daya manusia (karyawan RS) dan rumah sakit sebagai institusi,” imbuh legislator Partai Gerindra ini.

Syam menambahkan, akreditasi RS pada akhirnya juga akan meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional. Mengingat, akreditasi RS dilaksanakan oleh lembaga independen dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit harus terakreditasi oleh lembaga *International Society for Quality in Health Care (ISQua)*. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan salah satu lembaga independen yang melakukan akreditasi rumah sakit di Indonesia,” jelas legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

akreditasi RS pada akhirnya juga akan meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional. Mengingat, akreditasi RS dilaksanakan oleh lembaga independen yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Syam mengharapkan melalui Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Sulsel ini memperoleh gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami juga membuka ruang diskusi untuk menerima laporan terkait kendala-kendala yang dihadapi pihak rumah sakit serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pelaksanaan akreditasi rumah sakit,” tandas Syam.

Menutup sambutannya, Syam optimis bahwa rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang dihimpun melalui Kunspek ini akan menjadi masukan bagi pemerintah, sehingga ke depan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RS yang sudah terakreditasi dalam Program JKN menjadi optimal dan lebih baik lagi.

rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang dihimpun melalui Kunspek ini akan menjadi masukan bagi pemerintah, sehingga ke depan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RS yang sudah terakreditasi dalam Program JKN

Sementara itu, PJ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Bachtiar Baso mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah RS yang telah terakreditasi di Sulsel sebanyak 75 RS, re-akreditasi sebanyak 5 dan belum terakreditasi sebanyak 25 RS.

Bachtiar menjelaskan, dari total 25 RS yang belum terakreditasi itu 17 diantaranya adalah RS swasta, sisanya 8 adalah rumah milik Pemprov/pemkot/pemkab, RS TNI/Polri dan Kementerian lainnya. Ia menambahkan, dari 75 RS yang sudah terakreditasi 26 RS memperoleh status Paripurna, 5 RS Utama, 4 RS Madya, 3 RS Dasar dan 37 RS statusnya masih Perdana.

“Terkait permasalahan akreditasi kami sampaikan kendala biaya akreditasi yang relatif tinggi menjadi beban rumah sakit swasta apalagi di tengah kondisi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan ikut memperparah *cashflow* keuangan rumah sakit. Kami berharap Komisi IX DPR ikut membantu mencari solusi,” pungkasnya. ■ oji/sf

Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS

Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal tersebut disinyalir karena permasalahan akreditasi rumah sakit tersebut. Keputusan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat, terutama bagi pengguna BPJS Kesehatan.

Menyikapi hal tersebut, Komisi IX DPR RI dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengawasan pemenuhan akreditasi RS guna mendukung layanan dan kualitas mutu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kunjungan kita ke Sumut ini dalam rangka pengawasan DPR RI, dimana kita menemukan ada rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS dan,” ungkap Nova saat pertemuan dengan Dinas Kesehatan Sumut, organisasi profesi dan instansi terkait di Medan, Sumut, Selasa (15/1).

Lebih lanjut, Nova menyampaikan, dari hasil keterangan BPJS Kesehatan bahwa RS yang tidak lagi memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan karena belum memenuhi syarat akreditasi. Dalam kesempatan ini, pihaknya menemukan fakta bahwa Dinas Kesehatan Sumut merasa tidak dilibatkan dalam proses akreditasi rumah sakit.

“Ada temuan menarik, yakni Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan dalam proses akreditasi rumah sakit tidak dilibatkan sama sekali oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Padahal regulasi menyatakan bahwa Dinas Kesehatan harus dilibatkan dan diminta masukannya, ini dikarenakan

miskomunikasi atau memang sengaja tidak dilibatkan. Perlu diketahui apakah ini juga terjadi di provinsi lain,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat yang juga seorang Dokter ini memastikan, akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) maupun instansi terkait lainnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara meminta KARS jangan menjadi monopoli pusat tetapi ada regionalisasi (KARS tingkat wilayah) untuk efektivitas proses akreditasi apalagi dalam era otonomi daerah. Sejauh ini yang bersifat lokal hanyalah proses rekrutmen asesor, selebihnya masih bersifat sentralistik. Sehingga muncul istilah para asesor berkesan “siluman”.

Sebagaimana data dari BPJS Kesehatan bahwa ada 140 RS di Sumut yang telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan sebanyak 121 (86 persen) sudah terakreditasi. Jenis akreditasi terbanyak yaitu akreditasi perdana sebanyak 74 rumah sakit (53 persen).

Sedangkan pada tahun 2019 ada 3 RS yang tidak melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut karena alasan tidak lulus kredensialing, mengundurkan diri dan habis Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan adanya masalah internal. ■ skr/sf



Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf (kiri)

Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Simon McDonald

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan, peranan perempuan dalam dunia perpolitikan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Inggris dan Indonesia masih minim. Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, sehingga suara perempuan dapat terwakili.

Demikian diungkapkan Nurhayati saat menerima *The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office* (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

“Ini salah satu hal yang kita diskusikan bersama. Bagaimana perkembangan perempuan dalam dunia perpolitikan dan pencalegan, dan kita juga membahas mengenai proses demokrasi di kedua negara,” ungkap Nurhayati yang didampingi perwakilan perempuan parlemen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Menurut legislator Partai Demokrat

ini, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, DPR RI percaya untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia sendiri, konstitusi telah menjamin perempuan untuk berpartisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik. Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terepresentasikan dengan baik.

Selain membahas peranan perempuan, dalam kesempatan

... politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, DPR RI percaya untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan.

itu legislator dapil Jawa Timur ini juga menyoal sulitnya pengurusan VISA Inggris bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia berharap, Pemerintah Inggris dapat mempermudah kebijakan pengurusan VISA bagi WNI, khususnya bagi pelajar Indonesia.

“Ini penting saya sampaikan karena untuk mendapatkan VISA ke Inggris masih sulit. Beliau katakan ini akan disampaikan mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan sahabat kedua negara,” imbuhnya. ■ **ann/sf**

Mengingat keinginan dari masyarakat Bali sangat kuat agar RUU Provinsi Bali dapat segera diundangkan demi menggantikan UU yang ada saat ini, yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Bali saat ini. Saat ini, UU yang berlaku adalah Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut diungkapkan Sudiro usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Bali, serta civitas akademika, dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (10/1).

“Insya Allah kita akan masukkan ke RUU Akumulatif Terbuka, jadi tidak harus melewati prioritas lagi kita akan masukkan. Karena kita sadar Bali merupakan salah satu etalase yang dimiliki Indonesia. Jadi, di luar negeri itu, pada umumnya lebih mengenal Bali daripada Indonesia itu sendiri,” kata legislator Partai Hanura itu.

Menurut Sudiro, Baleg DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan RUU tentang Provinsi Bali menjadi RUU Prioritas Prolegnas, meskipun seluruh tahapannya harus melewati mekanisme yang ada. Tergantung dengan materi yang terkandung di dalam RUU tentang Provinsi Bali tersebut, dan juga sepanjang tidak ada masalah dengan RUU tersebut, maka Baleg DPR RI akan segera melakukan pertemuan pembahasan dengan mengundang seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan RUU tersebut.

“Kita lihat materinya yang diajukan apa, sepanjang itu *enggak* ada masalah dan kita akan coba lakukan pertemuan-pertemuan dan pembahasan dan kita undang semua *stakeholder* yang berkaitan dengan RUU Provinsi Bali terutama Pemda Balinya, jadi kita lihat dan prinsipnya kita terbuka untuk membicarakan RUU Provinsi Bali ini,” tegas legislator dapil Jawa Barat ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa keinginan Pemprov Bali untuk memasukkan RUU

Baleg Dorong RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sudiro Asno berharap jika usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali secara berkas sudah lengkap, dapat diusulkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Maka tidak menuntut kemungkinan, dapat dimasukkan ke dalam daftar RUU Akumulatif Terbuka yang tidak perlu melewati proses prioritas dan dapat segera diundangkan.



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sudiro Asno bertukar cenderamata dengan Sekda Provinsi Bali

tentang Provinsi Bali sudah disalurkan pada kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI sebelumnya. Dirinya pun mengakui bahwa untuk dapat dijadikan RUU Prolegnas Prioritas harus diusulkan secara resmi dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada. Diantaranya dokumen RUU-nya, Naskah Akademik dan lain-lainnya.

“Untuk dokumen hukumnya kan masih disusun, drafnya sudah bisa dikatakan mendekati final dan saat ini sedang dalam tahap sosialisasi dengan *stakeholder*,

terutama dengan Pemerintah Kabupaten Bali, setelah mendapatkan persetujuan semua pihak itu, tentu segera akan disampaikan ke DPR RI. Jadi sekarang ini drafnya sudah mendekati final,” katanya.

Dewa Made pun menjelaskan alasan mengapa RUU tentang Provinsi Bali perlu diundangkan. Menurutnya di UU yang ada sebelumnya pembentukan tentang Provinsi Bali bersamaan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga, jika dilihat dari sisi muatan yang ada sangat sedikit sekali dan sudah tidak sesuai dengan perspektif kebutuhan yang ada sekarang.

“Tentu memerlukan konten pengaturan yang lebih banyak. Muatan-muatan lokalnya yang perlu perlindungan sekali, dan diyakini juga bahwa RUU ini tidak akan menyentuh wilayah-wilayah sensitif yang tidak diperbolehkan dalam konteks NKRI. Jadi tidak perlu khawatir,” papar Dewa Made.

■ ndy/sf

Baleg DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan RUU tentang Provinsi Bali menjadi RUU Prioritas Prolegnas, meskipun seluruh tahapannya harus melewati mekanisme yang ada.

Bongkar Praktik Mafia Sepak Bola Hingga Akarnya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung penuh kinerja Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam upaya membongkar praktik mafia sepak bola Indonesia, khususnya pengaturan skor, hingga ke akar-akarnya.

“Praktik seperti ini jelas-jelas suatu kejahatan yang membuat dunia olahraga kita terpuruk. Ke depan mudah-mudahan di tahun 2019 ini citra olahraga kita bisa dikembalikan lagi,” kata Hetifah saat ditemui di sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1).

Masyarakat Indonesia baru saja merasakan euforia dengan prestasi yang

“... bongkar aja deh sampai habis, supaya kita yakin tujuan berolahraga ini adalah untuk mendorong adanya sportivitas, bukan justru kebalikannya,”

Foto: Geraldi/rni



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

diukir atlet Indonesia pada ajang Asian Games dan Asian Para Games 2018. Tak lama setelah merayakan kegemilangan prestasi atlet pada kedua ajang tersebut,

Baleg DPR Apresiasi Antusiasme Pemprov Sumsel Atas Prolegnas Tahun 2019

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas mengapresiasi antusiasme Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan beserta stakeholder terkait seperti civitas akademika Universitas Sriwijaya, Kepolisian, TNI AD dan Kejaksaan atas saran dan masukan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah.



Tim Kunker Baleg DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Foto: Ayu/rni

“Saya mengapresiasi atas antusias yang luar biasa. Hal itu terlihat dari banyaknya masukan dan saran terkait dengan RUU Prolegnas yang sudah ditetapkan DPR bersama pemerintah dan kini dalam pembahasan. Ini sangat berguna untuk lebih menyempurnakan RUU-RUU tersebut, agar dikemudian hari tidak ada yang menggugat atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Supratman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg dalam rangka sosialisasi Prolegnas Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/1).

Pada kesempatan itu, legislator Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan bahwa di tahun 2019 ini telah ditetapkan Prolegnas Prioritas tahunan sebanyak 55 RUU, yang terdiri dari 43 RUU usulan lama dan 12 RUU usulan baru. Dari 12 RUU baru itu sebanyak 7 RUU berasal dari usul inisiatif DPR RI, 4 RUU merupakan usul pemerintah (Presiden) dan 1 RUU atas inisiatif DPD RI.

Salah satu RUU Prolegnas yang pada kesempatan itu mendapat tanggapan dari

dunia olahraga Tanah Air justru digegerkan dengan praktik mafia sepak bola yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mengatur hasil pertandingan Liga Indonesia.

Legislator dapil Kalimantan Timur itu berharap praktik mafia olahraga ini adalah yang terakhir kalinya dan jangan sampai terulang lagi. “Makanya bongkar aja deh sampai habis, supaya kita yakin tujuan berolahraga ini adalah untuk mendorong adanya sportifitas, bukan justru kebalikannya,” tegas legislator Partai Golkar itu.

Sejak pertama kali dibentuk pada tanggal 21 Desember 2018, Satgas Anti Mafia Sepak Bola sudah menerima lebih dari 270 laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, akan dianalisa, diklarifikasi dan diverifikasi kepada pihak terkait sebelum dinaikkan ke tingkat penyidikan. Satgas Anti Mafia Sepak Bola juga sudah menahan beberapa oknum yang diduga terlibat langsung dalam praktik mafia sepak bola. ■ es/sf

Wakil Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) adalah revisi UU tentang Pendidikan Kedokteran, yang dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2018 lalu berjudul RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Civitas akademik Unsri meminta agar RUU tersebut tidak direvisi jika meniadakan uji kompetensi yang merupakan syarat untuk menjadi dokter.

Menanggapi hal itu, Supratman menjelaskan bahwa revisi UU Pendidikan Kedokteran harus dilakukan mengingat masih banyak kekurangan dalam RUU tersebut. Terkait uji kompetensi untuk menjadi seorang dokter tetap wajib dipertahankan, hal itu semata untuk menjaga kompetensi dari dokter. Namun hal itu seharusnya tidak diwajibkan bagi lulusan sarjana kedokteran untuk mendapatkan ijazah.

Ijazah seharusnya diberikan secara otomatis jika seseorang sudah mengikuti dan lulus pendidikan sarjana kedokteran. Tidak hanya itu, uji kompetensi calon dokter seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran, bukan oleh organisasi profesi. ■ ayu/sf

Industri Tembakau Wajib Diproteksi

Industri tembakau sangat strategis untuk menunjang perekonomian nasional. Dalam industri ini ada banyak petani kecil, buruh, sampai pedagang kecil yang harus dilindungi. Untuk itulah industri tembakau nasional wajib dilindungi oleh regulasi setingkat undang-undang (UU).

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertembakauan DPR RI Hendrawan Supratikno, usai mengikuti rapat Pansus dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1).

“INDEF dan KPPU sendiri mengatakan industri ini sangat strategis. Perannya dalam perekonomian nasional sangat tinggi. Sangat unik ada negara yang punya industri seperti ini. Kalau di Amerika Serikat ada empat industri strategis, gandum, jagung, kedelai, dan kapas yang betul-betul mendapat fasilitas dan proteksi dari pemerintahnya agar menjadi pilar kedaulatan pangan mereka,” jelas Hendrawan.

Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI itu memberi argumen tentang pentingnya proteksi negara terhadap industri tembakau ini. Selain penerimaan pajak yang tinggi dari cukai, industri tembakau nasional punya daya saing yang kuat. Bahkan, konten lokal dan serapan tenaga kerjanya sangat tinggi. “Jadi, industri seperti ini harus mendapat proteksi dari regulator. Bukan justru dikejar-kejar dan dihantui oleh peraturan-peraturan yang mencekik,” imbuhnya.

Dikatakannya, sampai saat ini DPR RI dan pemerintah masih berseberangan dalam memandang industri tembakau. Pemerintah, lanjut Anggota Komisi XI DPR RI ini, lebih senang persoalan pertembakauan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) karena lebih fleksibel. Jadi bila



Wakil Ketua Pansus Pertembakauan DPR RI Hendrawan Supratikno

ada perubahan mudah direvisi. Kalau diatur dalam UU, sulit prosedurnya bila ingin mengajukan revisi.

Sementara bagi DPR RI justru sebaliknya. Industri yang begitu strategis dan menghidupkan banyak orang harus dilindungi regulasi setingkat UU. “Ini industri strategis yang harus diproteksi secara kuat,” ucapnya, singkat. Sementara dalam rapat tersebut Pansus sengaja mengundang ekonom INDEF Enny Sri Hartati dan KPPU untuk memberi masukan seputar RUU Pertembakauan ini agar segera diundangkan.

INDEF melihat perlu payung hukum yang jauh lebih kuat dan tinggi untuk melindungi industri tembakau. Dan payung hukum itu adalah UU. Sementara KPPU melihat, bila industri tembakau diatur secara ketat akan bermunculan produk-produk rokok ilegal. Bagi KPPU, yang jadi persoalan adalah lemahnya daya tawar petani tembakau karena harus menjual hasil panennya ke produsen tertentu. Banyak harga jual petani di bawah harga dasar. Untuk itu, KPPU akan mengawasi sistem kemitraan ini. ■ mh/sf

BAKN Dalam Hasil Pemeriksaan BPK Banten

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menegaskan, BAKN perlu mengetahui lebih lanjut mengenai jenis temuan dan permasalahan terhadap temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, khususnya temuan yang berdampak pada kerugian negara atau daerah.

Dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Banten, Senin (14/1), BAKN mendapatkan data dari Direktorat Utama dan Pembinaan dan Pembangunan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK RI, sampai dengan Desember 2018 terdapat satu kasus kerugian daerah di Provinsi Banten yang telah diselesaikan tuntutan perbendaharaannya.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan ketelitian auditor di BPK Banten dalam menelaah laporan keuangan, Willgo mengusulkan agar dilakukan penambahan jumlah auditor. Sehingga

bersamaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses audit keuangan dapat bekerja lebih cepat dan kredibel untuk mendeteksi adanya laporan keuangan yang penyusunannya berpotensi munculnya kerugian daerah.

Willgo juga menyampaikan bahwa dari keseluruhan LHP dan rekomendasi yang diberikan BPK Banten kepada sejumlah lembaga di tingkat provinsi, sebanyak 50 persen hingga 85 persen sudah ditindaklanjuti secara baik. "Dari beberapa data yang diterima sudah sebagian besar lebih dari 50 persen sampai 85 persen sudah ditindak lanjut untuk masing-

... proses audit keuangan dapat bekerja lebih cepat dan kredibel untuk mendeteksi adanya laporan keuangan yang penyusunannya berpotensi munculnya kerugian daerah.

masing wilayah," imbuh Willgo, usai memimpin pertemuan.

Karena belum 100 persen rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti, legislator Partai Gerindra itu pun mengusulkan BPK Banten untuk mengajak DPRD Provinsi Banten, sebagai lembaga legislatif di daerah, untuk mendorong lembaga-lembaga eksekutif di Banten untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disusun BPK Banten.

"Karena masa tindak lanjut itu sekitar 60 hari kerja dan sampai hari ini masih banyak tersisa yang belum ditindaklanjuti. Karena ini sifatnya daerah, kita dorong BPK Banten bersama DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk mendorong lembaga-lembaga eksekutif di level provinsi untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini," tutup Willgo. ■ **opi,hs/sf**



Tim Kunker BAKN DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BAKN Willgo Zainar melakukan pertemuan dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten beserta jajaran



Foto: Husen/rni

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan sambutan acara Workshop dan Diskusi PKAKN di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Bogor

Analisis PKAKN DPR Harus Cepat Membaca Temuan BPK

Para analis yang bertugas di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI diimbau cepat membaca berbagai temuan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini penting untuk menjadi bagian dari sistem pendukung kinerja para Anggota Dewan.

Imbauan ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka *Workshop* dan Diskusi PKAKN di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Rabu (09/1). *Workshop* bertajuk “Membaca dan Memahami Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 BPK RI” ini, menghadirkan narasumber dari BPK dan diikuti para analis PKAKN.

Menurut Indra, *workshop* dan diskusi ini sangat baik untuk meningkatkan kapabilitas para analis PKAKN. “Para analis APBN harus terus menerus mempelajari

Para analis APBN harus terus menerus mempelajari pola temuan BPK dari seluruh Indonesia, sehingga mampu membaca temuan-temuan BPK yang jumlahnya ribuan itu dengan lebih cepat,

pola temuan BPK dari seluruh Indonesia, sehingga mampu membaca temuan-temuan BPK yang jumlahnya ribuan itu dengan lebih cepat,” harap Indra.

Dan hasil analisis PKAKN ini, sambung Indra, kelak akan disampaikan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Butuh pengetahuan tersendiri membaca sekian banyak laporan BPK itu, sehingga target waktu yang dibutuhkan DPR RI dalam menyimpulkan temuan-temuan laporan keuangan dapat segera dirilis.

“BAKN memang harus di-back up oleh PKAKN. Dan di sisa waktu yang tinggal sembilan bulan lagi masa periode ini, diharapkan banyak menghasilkan kesimpulan terkait temuan BPK yang dilaporkan ke DPR,” jelas Indra.

Indra menilai, para analis PKAKN sudah bekerja cukup baik. Namun, ada sedikit kendala menyangkut jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim bila dibandingkan dengan jumlah temuan BPK yang mencapai ribuan. Yang jelas, *workshop* ini jadi kesempatan terbaik bagi para analis untuk belajar lebih dalam bagaimana menganalisis dengan cepat berbagai temuan BPK. ■ mh/sf

Penghargaan perak didapatkan untuk kategori Partisipasi Pembangunan, bersaing dengan 33 lembaga pemerintah, swasta dan lembaga independen yang menjadi peserta kompetisi ini.

Penghargaan diberikan Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin kepada Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Humas Erna Agustina di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, pertengahan Desember 2018 lalu.

ICE Award merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh majalahcsr.id dengan peserta adalah perusahaan atau lembaga yang memiliki program untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan, demi keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana ICE Award 2018 Sam Agus Himawan menyampaikan, penghargaan ini diharapkan bisa memberi inspirasi pada lembaga swasta, pemerintah, atau para penggiat komunitas lain untuk mendesain ragam program yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan.

Bagi para pemenang, diharapkan makin melecut mereka untuk lebih

Humas DPR Raih Penghargaan ICE Award

Program Edukasi Parlemen yang dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul “Tak Kenal Maka Tak Sayang” berhasil meraih penghargaan di Indonesia Community Engagement (ICE) Award 2018.

baik dalam membangun iklim usaha yang berkelanjutan. Ia mendeskripsikan, perusahaan di Indonesia sudah mulai menerapkan *community engagement* (pemberdayaan komunitas di sekitar lokasi perusahaan atau lembaga).

penghargaan ini diharapkan bisa memberi inspirasi pada lembaga swasta, pemerintah, atau para penggiat komunitas lain untuk mendesain ragam program yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan ini pada akhirnya mendukung *sustainability* perusahaan. Hal ini yang coba didokumentasikan melalui ICE Award. Setidaknya, para pemenang ICE Award ini diharapkan menjadi *role model* bagi lembaga lain terkait *community engagement*.

ICE Award pertama kali digelar pada tahun 2018 dengan memiliki enam kategori penghargaan. Enam kategori itu diantaranya: partisipasi pembangunan, komunitas internal, komunitas media, komunitas masyarakat lokal, reportase warga, dan komunitas pelanggan.

Peraih penghargaan berlatar belakang beragam, mulai dari lembaga pemerintah, swasta, hingga komunitas yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. ■ ann/sf



Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Humas DPR RI Erna Agustina menerima penghargaan ICE Award 2018 dari Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin

Foto: majalahCSR.id



Foto: oij/k

Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing dan Pimpinan BURT DPR RI lainnya menunjukkan berkas DIPA DPR RI tahun Anggaran 2019

Alokasi anggaran ini terdiri atas satuan kerja (satker) Dewan sebesar Rp 3,695 triliun, dan satker Kesenjangan sebesar Rp 2,044 triliun. DIPA Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan DIPA 2018.

“Hal ini salah satunya dikarenakan alokasi anggaran untuk Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi dan Badan bidang Pengawasan, saat ini baru mendapatkan alokasi kunjungan satu negara tujuan,” katanya saat memimpin rapat BURT DPR RI dengan Pimpinan AKD serta jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dalam rangka penyerahan DIPA DPR RI tahun anggaran 2019, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1).

Penyerahan DIPA ini dilaksanakan dengan harapan agar kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, terutama AKD dalam upaya mewujudkan pengelolaan anggaran DPR RI yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BURT mengharapkan pelaksanaan DIPA DPR RI dapat lebih dioptimalkan, agar realisasi anggaran tahun 2019 dapat lebih efektif sesuai dengan rencana, sehingga lembaga dapat lebih

Anggaran DPR Tahun 2019 Sebesar Rp 5,7 Triliun

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI, alokasi anggaran DPR RI tahun 2019 adalah Rp 5,739 triliun.

baik dari tahun sebelumnya.

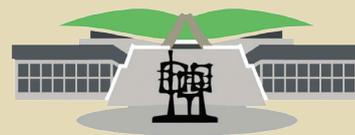
“Dewan akan lebih meningkatkan kinerja dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang belum selesai, dan rapat-rapat komisi dengan mitranya tetap ditingkatkan. Kita akan memaksimalkan penggunaan anggaran, dengan kerja

“Dewan akan lebih meningkatkan kinerja dengan menyelesaikan rancangan undang-undang yang belum selesai, dan rapat-rapat komisi dengan mitranya tetap ditingkatkan.”

semaksimal mungkin. Seperti masa persidangan ini, kita akan mengesahkan kalau bisa 5 RUU. Di samping itu, BURT harus bekerja semaksimal mungkin. Kinerja DPR tetap kita tingkatkan,” komitmen Anthon.

Di sisi lain, legislator Partai Golkar ini menilai, sistem penganggaran di lembaga politik itu berbeda dengan sistem penganggaran di lembaga pemerintah.

“Kalau di lembaga pemerintahan sudah di bulan 11 atau 12 anggaran masih ada, bisa saja dihabiskan rapat atau kunjungan kerja. Kalau di kita, enggak bisa. Cara anggaran di politik itu, bisa saja sekarang dianggarkan buat undang-undang, tetapi 8-10 bulan belum selesai, nyangkut karena banyak pihak-pihak yang terkait,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara itu. ■ as/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menerima kunjungan Chairman Of the Board Trustees Humanitarian Funds Of Royal Charity Qatar Abdulaziz Bin Ali Al-Thani, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1). Foto: Jaka/rmi



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1). Foto: Andri/rmi



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menggelar acara silaturahmi pengurus dan *talkshow* dengan mengundang CEO *kitabisa.com* dan Direktur Marketing ACT di Aula Masjid Baiturrahman DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1). Foto: Kresno/rmi

